

**PENGARUH ASEAN-INDIA *FREE TRADE AGREEMENT* (AIFTA)
TERHADAP INDUSTRI PETROKIMIA INDONESIA
PADA SEKTOR PERDAGANGAN**

Oleh:

Puteri Dwi Lestari ¹

(puteridwilestari50@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Pazli Mahyudin, S.Ip, M.Si

Bibliografi : 5 Jurnal, 10 Buku, 17 Artikel dan Laporan Resmi, 11 Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research examines the trade relations between Indonesia and India within the framework of AIFTA. Motivation ASEAN cooperation with India as there are market signals. India is the third economic power in Asia. India is the seventh largest trading partner for ASEAN. Therefore the Indian economy would greatly affect the economy of the member states of ASEAN. This research will look at how international trade between India and Indonesia before and after AIFTA implemented.

This study used a qualitative research method. Data collect through the study of literature (Library Research). The scope of this research are used to clarify the effect of the Asean-India Free Trade Agreement For Petrochemical's Industry in Indonesia on Trade Sector.

The results showed that AIFTA distort Indonesia petrochemical industry in upstream and downstream aspects. Implementation of AIFTA triggered floods Indian origin imported plastics products at more competitive prices due to duty-free entry, so not only undermine the performance of the downstream plastics industry, but come to existence of the upstream industry. This is due the petrichemical industry between India and Indonesia is much different where the Indian petrochemical industry ia already integrated with a large production capacity while in Indonesia just the oppposite.

Key word: Asean India Free Trade Agreement, International trade, Petrochemical Indutry, distortion

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh ASEAN- India *Free Trade Agreement* (AIFTA) terhadap industri petrokimia Indonesia. Perjanjian ini di latar belakang oleh kekhawatiran Indonesia pada dampak trade diversion, artinya apabila dua negara sepakat untuk melakukan perjanjian bebas, maka kegiatan ekspor impor akan banyak dilakukan oleh dua negara tersebut, akibatnya negara lain akan kehilangan potensi pasar untuk produk mereka.

Hubungan kerjasama ASEAN-India diawali dengan dialog sektoral pada tahun 1992 kemudian India mendapat status sebagai mitra wicara penuh pada bulan Desember 1995. Pada KTT di Phnom Penh tahun 2002 status kemitraan ASEAN-India ditingkatkan menjadi mitra Wicara ASEAN di tingkat kepala negara. Kedua pihak sepakat untuk menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and ASEAN* yang dilakukan pada pertemuan ke-2 ASEAN-India tahun 2003.² Pada pertemuan ke-21 ASEAN-India *Trade Negotiation Committee* (AI-TNC) di Manila 20-22 Oktober 2008 berhasil diselesaikan beberapa isu terkait negosiasi AIFTA di sektor barang seperti draft perjanjian, *Rules of Origin, Product Specific Rules, Dispute Settlement Mechanism*, Protokol Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi ASEAN-India dan *legal scrubbing*. Akhirnya perdagangan bebas dengan India mulai diimplementasikan sejak 1 Oktober 2010.³

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Petrokimia adalah

suatu bidang industri yang sangat potensial bila dikembangkan di negara-negara yang kaya dengan sumber daya minyak bumi dan gas alam. Hal ini dikarenakan bahan baku petrokimia berasal dari kedua sumber alam tersebut.

Industri petrokimia merupakan industri yang memproduksi bahan-bahan kimia yang berasal dari minyak bumi dan gas alam. Secara umum, industri petrokimia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu industri hulu yang produknya masih berupa bahan dasar dan setengah jadi seperti ammonia, methanol, black carbon, urea, etanol, etil klorida, cumene, propilen oksida, butyl alkohol, dan industri hilir yang produknya berupa barang jadi yaitu seperti barang-barang yang banyak dipakai sehari-hari, yaitu botol plastik, kerangka ac, bumper mobil, kantong plastik, obat-obatan, dan sebagainya.⁴

Kondisi sumber daya alam di Indonesia berupa minyak dan gas bumi merupakan modal dasar bagi pengembangan industri Petrokimia di tanah air. Elemen-elemen penting yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri Petrokimia di Indonesia telah tersedia dan melimpah. Dalam praktiknya, pengalokasian sumber daya untuk diolah bagi pengembangan industri Petrokimia belum optimal. \

Sampai saat ini, Indonesia masih menggantungkan sebagian besar kebutuhan energinya pada minyak bumi. Walaupun masih mengeksport minyak mentahnya ke berbagai negara, namun Indonesia juga masih mengimpor minyak bumi untuk menutupi kekurangan produksi dan penggunaan domestik.

Pertumbuhan industri petrokimia Indonesia dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap bahan kimia terus meningkat. Namun masih adanya kesenjangan antara permintaan dan pemasokan adalah suatu celah untuk pengembangan bertahap dari industri petrokimia. Masalahnya kembali terletak pada

² Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN- Kementerian Luar Negeri.(2010). *Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN Dengan Mitra Wicara*. Jakarta: Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN- Kementerian Luar Negeri.

³ASEAN-India Segera Tuntaskan Materi Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas.

<http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/2112-asean-india-segera-tuntaskan-materi-perjanjian-kerjasama-perdagangan-bebas-.pdf>, diakses tanggal 10 september 2014 pukul 20.00 WIB.

⁴http://www.academia.edu/8289817/INDUSTRI_PETROKIMIA, diakses tanggal 20 november 2014 pukul 10.10 WIB.

ketersediaan bahan baku. Produk petrokimia yang dihasilkan industri hulu lebih ditekankan untuk diimpor padahal kebutuhan produk tersebut untuk pertumbuhan industri hilir sangat besar.⁵

Potensi permintaan industri petrokimia domestik masih besar seiring dengan konsumsi produk petrokimia per kapita yang baru mencapai 9 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi domestik ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi produk-produk petrokimia pada negara utama di wilayah ASEAN seperti Malaysia sebanyak 44 kg/kapita/tahun, Singapura sebanyak 75 kg/kapita/tahun, dan Thailand sebanyak 18 kg/kapita/tahun. Di tengah potensi permintaan yang tinggi tersebut perkembangan industri petrokimia nasional masih belum optimal, sehingga berdampak pada tingkat impor produk petrokimia baik hulu dan hilir yang selalu cenderung meningkat setiap tahun. Hal tersebut memberatkan bagi industri domestik, ketika pada saat yang bersamaan penerapan aturan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN dan India diberlakukan.⁶

Mengarah pada kondisi tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pasar lokal Indonesia terancam oleh keberadaan dari produk-produk India yang terlihat melalui tingginya angka impor Indonesia. Kenyataan ini dianggap oleh para pengusaha lokal Indonesia sebagai suatu bentuk ancaman bagi keberlangsungan produksi dalam negeri Indonesia.⁷

Pesaing utama Indonesia di Asia Tenggara adalah Thailand, disusul Malaysia dan Singapura. Masing-masing negara memiliki industri petrokimia berkapasitas besar yang didukung teknologi modern. Kapasitas

industri petrokimia dalam negeri sangat kecil. Sebagai perbandingan, saat ini Thailand memproduksi ethylene--bahan baku plastik--berkapasitas hingga 4 juta ton per tahun. Indonesia baru memiliki dua produsen: Chandra Asri dan Pertamina dengan kapasitas hanya 2 juta ton per tahun.⁸

Pesatnya pertumbuhan investasi industri petrokimia sangat positif seiring tingginya permintaan produk petrokimia domestik yang mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sementara dari segi kapasitas produksi, Indonesia hanya memiliki kapasitas sekitar 3,9 juta ton per tahun. Angka produksi itu jauh tertinggal dibanding Thailand yang memiliki kapasitas produksi sebesar 12,1 juta ton per tahun, Singapura 9,8 juta ton per tahun, dan Malaysia sebesar 4 juta ton per tahun.⁹

India sebagai mitra dagang negara-negara Asean dalam kerangka AIFTA merupakan negara yang memiliki industri petrokimia yang sudah terintegrasi. India memiliki luas 3,17 juta persegi kilometer, lebih dari 1,22 milyar populasi dan merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling cepat di dunia. India memiliki minyak penyulingan berkapasitas lebih dari 194 Juta Ton per Tahun (MTPA). Kilang terbesar di dunia dengan 32 kapasitas MTPA terletak di India. Industri petrokimia di India telah menjadi salah satu industri yang paling cepat berkembang. Industri petrokimia India tumbuh pada tingkat 11 % di 2010-2011. Prospek untuk 2011-2012 stabil dan pasar bahan kimia diperkirakan akan tumbuh pada 11-13 % selama lima tahun ke depan.¹⁰

⁵old.analytical.chem.itb.ac.id/.../Green_Chemistry.docx/ industri petrokimia di Indonesia/irika devi angraini.

⁶<http://regionalinvestment.com/newsipid/id/userfiles/pi/PERENCANAAN%20PENGEMBANGAN%20INVESTASI%20INDUSTRI%20PETROKIMIA%20TERINTEGRASI%202011.pdf> diakses tanggal 20 oktober 2014 pukul 08.00 WIB.

⁷ Oktaviani, Rina. "Dampak free trade arrangements (FTA) terhadap ekonomi makro, sektoral, regional, dan distribusi pendapatan di Indonesia". Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol 15, No 3 (2010).

⁸<http://www.tempo.co/read/news/2010/10/31/090288440/Perkawinan-Tri-Ployta-Chandra-Asri-Bisa-Perkuat-Industri-Petrokimia>, diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 10.13 WIB.

⁹[https://ipotfund.com/pages/newsResearch/newsDetail.php?jdl=2014_Investasi_Industri_Petrokimia_Capai_US_\\$7_Miliar&news_id=94714&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=THAILAND&name=](https://ipotfund.com/pages/newsResearch/newsDetail.php?jdl=2014_Investasi_Industri_Petrokimia_Capai_US_$7_Miliar&news_id=94714&group_news=RESEARCHNEWS&taging_subtype=THAILAND&name=), diakses pada tanggal 21 oktober 2014 pukul 10.08 WIB.

¹⁰http://www.ficci.com/sector/88/Project_docs/sector-profile-FICCI-petrochemical.pdf diakses pada tanggal 20 oktober 2014 pukul 09.19 WIB

Kapasitas produksi India saat ini adalah 3850 KT (KiloTon) dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 7130 KT pada 2014-2015. Permintaan telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 8-10 % dan proyeksi pertumbuhan di masa depan adalah 12-13 % didorong oleh investasi hilir.¹¹

Kerjasama perdagangan Asean dan India pada sektor industri petrokimia adalah melalui kegiatan ekspor Impor produk hulu(bahan baku) dan hilir(bahan jadi) petrokimia, India sebagai pelaku ekspor atau eksportir produk hilir seperti produk otomotif, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. artinya India mengekspor produk tersebut ke negara-negara Asia Tenggara khususnya negara Indonesia. Oleh karena itu Indonesia terpaksa melakukan impor pada produk hilir. Ancaman terhadap Indonesia pada sisi hulu datang dari internal kawasan Asean itu sendiri, dimana Singapura, Malaysia dan Thailand memiliki industri petrokimia yang juga terintegrasi bahkan jumlah produksinya masih diatas Indonesia, artinya Indonesia bersaing dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan ekspor produk hulu ke India. Untuk mempermudah proses penelitian ini maka penulis menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari beberapa teori dan pendapat para ahli yang mengkaitkannya dengan objek penelitian. Teori-teori serta pendapat-pendapat tersebut akan digunakan sebagai langkah penulis dalam mengemukakan kerangka teoritis, diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif liberalisme. Perspektif liberalisme merupakan salah satu pendekatan dalam ekonomi politik internasional yang pada dasarnya berawal dari pandangan bahwa setiap manusia itu baik dan rasional, dan karena manusia itu rasional maka akan menginginkan adanya kerjasama untuk mencapai kepentingan tertentu. Perjanjian

¹¹<http://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/chem/Petrochemicals-Sector-Analysis-Report.asp> ,diakses pada tanggal 20 oktober 2014 pukul 09.21 WIB.

perdagangan bebas antara India dan Asean merupakan keputusan yang diambil oleh India dan negara anggota Asean untuk menjaga kestabilan ekonomi politik nasionalnya ditengah arus masuk perdagangan bebas dan juga untuk menjaga iklim investasi bagi Indonesia.

Dalam mengangkat fenomena-fenomena yang ada dan terjadi dalam hubungan internasional, penulis akan menggunakan konsep dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti sebagai sarana pedoman dalam objek penelitian ini., yaitu konsep perdagangan internasional,

Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional, Soelistyo menyebutkan: Perdagangan Internasional pada saat ini merupakan proses kegiatan ekonomi yang penting. Perdagangan yang terjadi dalam beberapa skala memungkinkan terjadinya saling tukar-menukar barang-barang dan jasa, pengerahan sumber daya, juga meliputi pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran bangsa-bangsa.¹² Dalam perdagangan internasional negara-negara maju memiliki posisi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara yang sedang berkembang.

Teori Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas didefinisikan Ricardo sebagai aktifitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional yang akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan dengan demikian dapat meningkatkan produktifitas.¹³

John Stuart Mill tahun 1848 menyatakan bahwa pasar bebas merupakan cara untuk mengakhiri perang dengan memperkuat dan memperbanyak

¹²T. May Rudi, Administrasi dan organisasi internasional (Bandung: PT Eresco, 1998), hlm. 103.

¹³ Robert Jackson dan George Sorensen. 2009. Pengantar Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 235

kepentingan personal yang berbuat secara alamiah bertentangan dengan perang.¹⁴ pasar akan menghasilkan hubungan saling ketergantungan yang akan menambah pemahaman antara masyarakat dan mengurangi konflik. Maka, kepentingan ekonomi secara pribadi bukan merupakan suatu pendukung perang. Ketergantungan akan menggantikan persaingan nasional, tindakan penyerangan sepihak, dan saling balas dendam yang merajalela dimana-mana.

Backwash Effects Theory

Teori yang dikembangkan oleh Gunnar Myrdal. Teori ini mengkritik pandangan dari ekonomi klasik yang menganggap bahwa pembangunan ekonomi suatu wilayah dunia akan menyebar ke wilayah lainnya karena adanya perdagangan internasional. Pada kenyataannya, menurut Myrdal di pasar internasional negara-negara sedang berkembang kalah dalam bersaing karena adanya disparitas teknologi yang sangat mencolok. Hal ini disebut sebagai backwash effects dari perdagangan internasional bagi negara sedang berkembang. Kedua, ekspor dari negara sedang berkembang mengandalkan produk primer dan unskilled labor sehingga hasil produknya menghadapi elastisitas permintaan yang rendah.

Teori Dependensia

Teori ini berpendapat bahwa pada dasarnya di dunia ada dua jenis negara, yang pertama adalah negara pusat (core) yakni negara-negara maju, yang kedua adalah negara-negara pinggiran (periphery) yakni negara-negara sedang berkembang. Negara-negara pinggiran sangat bergantung kepada negara pusat. Negara pusat melakukan penghisapan kepada negara-negara pinggiran (surplusnya dihisap) yang mengakibatkan adanya pertukaran yang tidak adil. Foreign investment membuat pertumbuhan ekonomi negara sedang berkembang semakin tergantung pada negara maju demi kepentingan pasar dan modal. Hal ini terjadi karena adanya inequal

exchange antara negara sedang berkembang dan negara maju. **Isi**

Latar Belakang AIFTA

Hubungan kerjasama ASEAN dengan India secara resmi diawali dengan dilakukannya dialog sektoral pada tahun 1992. Hubungan kedua pihak terus berkembang dengan ditingkatkannya status India menjadi mitra wicara penuh pada bulan Desember 1995. Selanjutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi di Phon Penh tahun 2002 status kemitraan ASEAN-India ditingkatkan menjadi mitra wicara ASEAN di tingkat kepala negara.

Ide untuk membentuk perdagangan bebas ASEAN-India pertama kali diusulkan oleh India. Keinginan India itu diungkapkan oleh Perdana Menteri India saat itu, Atal Bihari Vajpayee dalam *ASEAN Economic Ministers (AEM)-India Consultations* yang pertama pada bulan September 2002, di Brunei Darussalam.¹⁵ ASEAN kemudian menyambut baik hal itu, dan sepakat membentuk *ASEAN-India Economic Linkages Task Force (ASEAN-India Task Force)* yang bertugas untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh *ASEAN-India Joint Study* dan membuat rancangan kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi ASEAN-India (FA).¹⁶ *ASEAN-India Task Force* kemudian menyerahkan kedua dokumen itu dalam pertemuan tingkat *Senior Economic Officials*.¹⁷ pada saat pertemuan AEM India Consultations yang kedua bulan September 2003 di Kamboja.¹⁸

¹⁵ Rahul Sen. 2004. *Free Trade Agreements in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. hal. 80.

¹⁶ Rahul Sen, *Op. Cit.*, hlm.82.

¹⁷ ASEAN Sekretariat "Joint Press Statement, The First ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation," *Op. Cit.*

¹⁸ ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The Second ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation 3 September 2003, Kamboja", melalui:

¹⁴ Scott Burchill and Andrew Linklater. 2009. Teori-teori Hubungan Internasional. Bandung: Nusa Media, hal 47

Setelah melalui perundingan yang panjang akhirnya, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India atau yang dikenal *Agreement on Trade Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* atau lebih dikenal dengan *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dapat diselesaikan pada 28 Agustus 2008 dalam *AEM-India Consultations* keenam di Singapura.¹⁹ Hal ini kemudian menyebabkan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-India baru ditanda tangani pada 13 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan perjanjian di bagi dalam beberapa periode waktu tertentu. Sesuai dengan kesepakatan, perjanjian tersebut tidak akan serentak diterapkan oleh semua negara anggota ASEAN. Sejak 1 Januari 2010 yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura dan India. Kemudian menyusul Vietnam dan Myanmar memberlakukan kesepakatan tersebut pada 1 Juni 2010. Sedangkan untuk Indonesia sendiri baru menerapkannya pada 1 Oktober 2010.

Di Indonesia, perusahaan petrokimia lokal terbesar adalah Pertamina. Industri petrokimia Pertamina yang berbahan baku minyak dan gas bumi antara lain Kilang Metanol di Pulau Bunyu Kalimantan Timur, Kilang Purified Terephthalic Acid (PTA) dan Kilang Polypropylene (Polytam) di Plaju, Sumatra Selatan, Kilang Paraxylene dan Benzene di Cilacap, Jawa Tengah.

Masalah lain yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah mengenai pengadaan bahan baku untuk industri hulu petrokimia.

Hingga kini, ketergantungan terhadap bahan baku naphta untuk olefin center dan kondensat center cukup tinggi. Minimnya ketersediaan bahan baku naphta di Indonesia mengharuskan industri petrokimia untuk mengimpor naphta dari luar. Sampai saat ini belum ada pengembangan lebih lanjut mengenai produksi naphta untuk mengatasi masalah ini. Ketersediaan gas alam di Indonesia untuk industri amoniak dan urea pun masih terbatas karena sebagian gas alam dari dalam negeri diekspor untuk memenuhi kontrak penjualan jangka panjang. Akibatnya, produksi pupuk urea di Indonesia terhambat.

Kerjasama Ekonomi ASEAN-India dalam kerangka AIFTA

Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India). Dalam hubungan ini Indonesia dapat mencatat adanya komitmen yang besar dari India untuk lebih meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal itu terbukti setelah PM India, Atal Behari Vajpayee membuat sebuah kebijakan baru, yakni "New East Look Policy".

Bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya Indonesia, kebijakan baru India tersebut ditanggapi secara positif untuk mencari dan menambah berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, khususnya di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan serta sosial budaya. Bagi kepentingan Indonesia, kebijakan baru India di Asia Pasifik itu dapat dijadikan salah satu peluang cukup besar dalam rangka membantu mengurangi krisis ekonomi dan keuangan yang masih berkepanjangan dan yang masih dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

<http://www.aseansec.org/15081.htm> , diakses pada tanggal 20 maret 2015, Pukul 22.00 WIB

¹⁹ ASEAN Sekretariat, "*Joint Media Statement of the Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India, Singapore*",

<http://www.aseansec.org/21895.htm>, diakses pada tanggal 21 april 2015, pukul 17.50 WIB

Dari segi jumlah penduduk yang besar di antara kedua negara, banyak sekali peluang ekonomi, investasi, perdagangan, dan pariwisata serta bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh kedua negara. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dan pengalaman India dalam sistem penswastaaan aset-aset negara dan peningkatan infrastruktur yang mencakup wilayah yang sangat luas. Di samping itu, Indonesia juga bisa mempelajari bagaimana upaya India menghadapi persaingan global dalam rangka melaksanakan berbagai upaya liberalisasi perdagangan.

Distorsi Internal

1. Modal

Pemanfaatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang menjadi basis industri petrokimia di Indonesia masih rendah karena industri petrokimia padat modal dan padat teknologi. Dibutuhkan modal yang besar untuk membangun sebuah pabrik petrokimia beserta teknologinya.

Berdasarkan *roadmap* industri yang disusun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sektor petrokimia nasional membutuhkan tambahan paling sedikit empat pabrik petrokimia di sisi hulu yang memproduksi metanol berkapasitas 5.000 ton per hari dengan kebutuhan investasi sekitar US\$400 juta, pabrik amoniak berkapasitas 2.000 ton per hari dengan total investasi US\$250 juta, pabrik aromatik berkapasitas 500.000 ton per tahun dengan total investasi US\$1 miliar, dan sektor olefin berkapasitas 700.000 ton etilena per tahun dan 400.000 ton propilena per tahun dengan perkiraan investasi US\$700 juta. Keempat pabrik tambahan tersebut diperlukan untuk mendukung peningkatan produksi biodiesel, asam asetat, pupuk, polietilena, polipropilena, dan PVC.²⁰

Karakteristik dari investasi pada sektor migas yang unik, yaitu bersifat padat modal, padat teknologi, dan padat risiko, membuat industri migas menjadi eksklusif dan tertutup.

Sektor migas memerlukan investasi yang besar terutama pada awal kegiatan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya juga membutuhkan teknologi tinggi dan tidak bersifat padat karya. Kegiatan ini juga secara instrinsik penuh dengan risiko, baik risiko finansial (karena rasio keberhasilan pemboran di Indonesia secara rata-rata sekitar 30 persen) risiko kecelakaan kerja, maupun risiko kerusakan lingkungan.²¹

2. Kebijakan Pemerintah

Sebagian besar sumberdaya minyak dan gas bumi dimanfaatkan di dalam negeri sebagai bahan bakar atau diekspor dalam bentuk bahan mentah. Kalaupun ada pembangunan pabrik petrokimia, prosesnya begitu panjang dan memakan biaya yang besar karena adanya biaya untuk infrastruktur, dimana investor harus membangun sendiri jaringan pipa, pelabuhan, jalan dll.) dan Biaya utilitas (air, listrik dan gas) yang tinggi.

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan komoditas strategis yang tidak terlepas dari percaturan politik dunia hingga saat ini dan menyumbangkan pendapatan terbesar bagi perekonomian indonesia. Migas memang berkontribusi paling tinggi dibanding sektor lain pada pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menjadi lengah dan tidak bisa melihat berbagai masalah yang terjadi dalam penambangan migas. Akibatnya, Pertamina sebagai satu-satunya pemegang hak atas migas di Indonesia bersama dengan kontraktornya menjadi leluasa berbuat sewenang-wenang atas kekayaan alam Indonesia. Kesalahan utama kebijakan dan orientasi pertambangan di

²⁰ Iman Sudirman dan Horas Djulius, *Trikonomika*: Volume 9, No. 2, Desember 2010, Hal. 94

²¹ Gde Pradnyana. *Nasionalisme migas*. 2014. Nayottama press holdings. Banten. Hal 127.

Indonesia bermula dari UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang diikuti penandatanganan kontrak karya (KK) generasi I antara pemerintah Indonesia dengan freeport McMoran. Disusul dengan UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Sejak saat itu Indonesia memilih politik hukum pertambangan yang berorientasi pada kekuatan modal besar dan eksploitatif. Dampak selanjutnya adalah keluarnya berbagai regulasi pemerintah yang berpihak kepada kepentingan pemodal. Dari kebijakan-kebijakannya sendiri, akhirnya pemerintah terjebak pada posisi lebih rendah dibanding posisi pemodal. Akibatnya, pemerintah tidak bisa bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang seharusnya patut untuk ditindak.

Konstitusi di Indonesia mengamanatkan bahwa “hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara”. Migas sebagai salah satu sumber energi jelas menguasai hajat hidup orang banyak, karena itu dikuasai oleh negara. Hal ini yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Namun, penguasaan negara yang dituangkan dalam UU Migas lebih menekankan pada penguasaan di sisi hulu, yaitu dengan pembentukan “badan pelaksana” yang dimaksudkan sebagai perpanjangan tangan negara untuk melakukan manajemen operasional industri hulu migas. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memutuskan bahwa pembentukan “badan pelaksana” dianggap inkonstitusional dan mengamanatkan pemerintah untuk mengambil alih peran “badan pelaksana” tersebut. Namun, karena pengusahaan kegiatan hulu migas dilakukan berdasarkan kontrak, bukan konsesi sebagaimana di pertambangan umum, dan pemerintah tidak boleh berkontrak dengan swasta (perusahaan migas), maka pemerintah membentuk sebuah satuan kerja khusus untuk

mewakili pemerintah untuk berkontrak dan melaksanakan pengelolaan migas di sektor hulu.

Sementara di sektor hulu migas dibutuhkan sebuah “institusi pelaksana”, di sektor hilir UU Migas No 22 Tahun 2001 hanya membentuk “badan pengatur”, bukan “badan pelaksana hilir”. Artinya adalah pengelolaan kegiatan hilir, khususnya distribusi BBM (bersubsidi maupun nonsubsidi) dan gas pipa, diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah hanya mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan swasta (nasional maupun asing) ini berbisnis di sektor hilir tanpa ikut campur tangan dalam kegiatan hilir.

Dengan pola yang ada pada UU migas saat ini, penguasaan negara atas industri migas hanya terbatas di sektor hulu. Padahal, persoalan utama ada di sektor hilir, karena sektor hilirlah yang berhubungan secara langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Karena pengelolaan migas tidak sepenuhnya dikuasai negara, maka para pemain di sektor hilir melakukan bisnisnya secara leluasa. Khusus untuk BBM, pemerintah menyerahkan bisnis penjualan BBM nonsubsidi kepada swasta, baik nasional maupun asing, dan BBM bersubsidi kepada Pertamina.

Penguasaan negara atas BBM bersubsidi terbatas pada penetapan harga semata, sementara dalam hal volume dan distribusi, pemerintah hanya bertindak sebagai “pengatur”. Akibatnya, posisi pemerintah semakin sulit untuk menyediakan subsidi BBM dengan jumlah yang semakin lama semakin meningkat.²²

Kebijakan perdagangan kurang memberikan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan industri nasional. Bukan hanya bagi industri petrokimia saja, namun industri nasional pada umumnya.

²² Gde Pradnyana. Nasionalisme migas. 2014. Nayottama press holdings. Banten. Hal 173-175.

Pemerintah perlu memberikan ruang bagi pertumbuhan industri nasional ditengah semakin besarnya dorongan perdagangan bebas, baik antar negara maupun dalam regional kawasan, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya bagi pertumbuhan industri nasional dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait perdagangan internasional.

Indonesia telah dikaruniai minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup besar. Kekayaan alam tersebut berpotensi untuk ditingkatkan nilainya, tidak sekedar dijual begitu saja dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku. Nilai tambah dapat diberikan melalui sentuhan teknologi di industri sehingga kekayaan alam tersebut dapat menjadi pilar kesejahteraan yang merupakan tujuan pendirian negara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi negara ini. Langkah-langkah menjual kekayaan alam mentah dengan harga murah sebenarnya dapat menjadi indikasi lemahnya komitmen pemerintah terhadap pencapaian tujuan negara dan lemahnya komitmen terhadap konstitusi negara ini.

3. Industri Belum Terintegrasi

Industri petrokimia di Indonesia selama ini belum terintegrasi, diperlukan tiga kilang baru dengan kapasitas masing-masing 300.000 barel per hari. Kilang tersebut harus dibangun terintegrasi dengan pabrik petrokimia untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) dan bahan baku pabrik olefin dan aromatik. Belum ada integrasi secara menyeluruh antara industri hulu, antara, hilir dan produk jadi.

Saat ini, PT Pertamina (Persero) sedang memaksimalkan jaringan kilang yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Banten, Kalimantan, dan Papua karena selama ini 800.000 ton kebutuhan petrokimia dalam negeri dipasok dari impor.

Impor Indonesia di sektor migas dan petrokimia senilai 32 miliar dolar AS. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam berupa migas dan batu bara untuk mengembangkan industri petrokimia sebagai salah satu penopang industri

nasional. Untuk itu, perlu dibangun industri petrokimia baru di Indonesia.

"Keberadaan industri petrokimia memberi manfaat antara lain penguatan struktur industri kimia dan industri terkait dari hulu hingga produk jadi, pengembangan wilayah industri, dan penghematan devisa.

Saat ini, Indonesia masih kekurangan pasokan produk-produk petrokimia, seperti polypropylene dengan kebutuhan 1.055.000 ton, sedangkan pasokannya hanya 955.000 ton. pengembangan industri petrokimia perlu difokuskan pada penguatan struktur hulu ke hilir melalui pembangunan industri petrokimia dasar yang memanfaatkan cadangan migas dan batu bara. saat ini Pertamina hanya bisa memenuhi 10 persen kebutuhan petrokimia dalam negeri.

Potensi industri petrokimia sangat besar, sehingga diperlukan pembangunan kilang untuk mencapai tujuan itu. Saat ini Pertamina memiliki dua kilang besar, yaitu kilang Balongan dan Cilacap, lalu ada di Balikpapan dan di Tangguh Papua.²³

Untuk mengatasi masalah bahan baku nafta, industri petrokimia di dalam negeri harus secepatnya terintegrasi dengan kilang minyak. Selain dapat menjamin pasokan bahan baku, pengeluaran juga lebih efisien.

Semua industri petrokimia di negara maju terintegrasi dengan kilang minyak. Sedangkan di Indonesia, industri petrokimia dan kilang berjalan sendiri-sendiri. Kilang yang ada juga hanya fokus memproduksi bahan bakar minyak (BBM). Setetespun, tidak ada kucuran nafta untuk industri petrokimia nasional. Selama ini industri petrokimia 100% menggantungkan pasokan bahan baku nafta hasil impor. Pada 2010, impor nafta mencapai 1,7 juta ton. Padahal mendapatkan nafta di dunia juga semakin sulit. Kontrak pembelian yang dilakukan

²³<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5230/Pembangunan-Industri-Harus-Terintegrasi>, diakses pada tanggal 6 agustus 2015 pukul 19.17 wib

tidak ada yang bisa dilakukan untuk jangka panjang. Ke depan industri petrokimia di Indonesia sangat rawan menghadapi kesulitan bahan baku.

Integrasi industri petrokimia dengan kilang minyak hanya butuh komitmen dari pemerintah. Namun sejauh ini belum ada pemimpin di Indonesia yang mempunyai kemauan politik mewujudkan itu. Misalnya, kilang baru yang akan dibangun Pertamina di Cilacap, semula direncanakan untuk memproduksi BBM, juga memasok nafta untuk industri petrokimia. Tapi belakangan, kilang minyak itu diputuskan hanya fokus untuk BBM.

Selain mengimpor nafta, Indonesia juga mengimpor minyak mentah untuk kilang minyak. Untuk kebutuhan BBM saja, impor yang dilakukan mencapai 550.000 barel per hari dari total kebutuhan 1,5 juta barel. Untuk bisa mengatasi bahan baku nafta bagi industri petrokimia sekaligus BBM, hanya bisa dilakukan jika Indonesia mampu membangun 3 kilang minyak baru berkapasitas 300.000 barel per hari pada 2015 sesuai program pemerintah.

Sebagai informasi, industri hulu petrokimia mengolah nafta menjadi berbagai produk turunan di antaranya polietilena dan polipropilena yang dipergunakan untuk produksi plastik. Kebutuhan plastik dalam negeri terus meningkat mengikuti pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2015 diperkirakan bertumbuh 13% hingga 15%.

Penguatan struktur industri petrokimia perlu diintegrasikan dengan pendirian kilang minyak di sentra produksi untuk menghasilkan nafta dan kondensat. Namun, untuk dapat menjamin pasokan bahan baku baik gas, nafta dan kondensat dalam jangka panjang masih butuh waktu lama.²⁴

²⁴<http://industri.kontan.co.id/news/atasi-bahan-baku-industri-petrokimia-harus-terintegrasi-dengan-kilang-minyak>, diakses pada tanggal 6 agustus 2015 pukul 19.21 wib

4. SDM

Sifat dari industri petrokimia selain padat modal, adalah padat teknologi dan risiko. Hal-hal tersebut juga terkait langsung dengan kualitas SDM. Penguasaan teknologi dan kemampuan untuk melakukan mitigasi dan meminimalkan risiko akan dapat menekan biaya eksplorasi dan eksploitasi migas yang dibutuhkan. Ini artinya SDM yang berkualitas tinggi akan sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya migas. Kebutuhan yang sangat tinggi terhadap SDM yang berkualitas ini seharusnya membuka peluang bagi SDM di Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya. Namun kenyataan yang ada di Indonesia adalah Minimnya pasokan SDM trampil untuk industry Plastik dan Petrokimia.

Melalui peningkatan kualitas secara terus menerus maka SDM yang berkualitas tinggi dan berjiwa teknologi (technology minded) secara bertahap akan menggeser orientasi pelaku bisnis industri penunjang yang saat ini lebih bersifat sebagai pedagang yang menjadi pelaku bisnis yang berjiwa industrialis. Hal ini akan berkontribusi dalam melepaskan ketergantungan industri Indonesia terhadap pasokan bahan baku impor, teknologi impor, serta menghindarkan industri di Indonesia hanya sekedar dijadikan tempat untuk merakit komponen impor untuk memasok kebutuhan kegiatan migas di Indonesia.²⁵

Saat ini SDM dengan kemampuan dan pengalaman yang memadai di bidang petrokimia sangat diminati oleh pasar tenaga kerja terlatih di pasar internasional. Banyak SDM petrokimia Indonesia yang memilih "boyongan" ke industri petrokimia yang mulai dikembangkan di beberapa kawasan, termasuk kawasan timur tengah. Oleh sebab itu, perguruan-perguruan tinggi di tanah air perlu didorong untuk meningkatkan

²⁵ Gde Pradnyana. Nasionalisme migas. 2014. Nayottama press holdings. Banten. Hal 129-130.

pasokan SDM ke industri petrokimia dengan bekal pengetahuan dasar yang memadai. Pematangan kemampuan secara nyata perlu dilakukan oleh industri yang terintegrasi dengan proses peningkatan kapasitas teknologi di Industri.

Distorsi Industri Petrokimia Indonesia pada Aspek Hulu dan Hilir

Distorsi Eksternal

1. IMPOR

Dewasa ini kebutuhan komoditi plastik di Indonesia sebagai produk hilir dari industri petrokimia sangat tinggi, hampir seluruh industri dalam negeri membutuhkan bahan baku plastik. Pengguna terbesarnya adalah industri makanan dan FMCG (*fast moving consumer goods*) yang mencapai 60%. Tercatat tahun 2013 kebutuhan plastik dalam negeri sebesar 1,9 juta ton, meningkat 22,58% dari 2012, yaitu 1,55 juta ton. Sedangkan dari total kebutuhan dalam negeri tersebut, 749 ribu ton masih harus diimpor dari luar, dan semakin naiknya kebutuhan plastik tiap tahun tersebut membuat angka impor juga semakin naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, importasi plastik dan barang dari plastik selama 2013 naik 11,7 % secara *year on year* menjadi 2,48 miliar US Dollar. Adapun impor di periode sebelumnya tahun 2012 sebesar 2,22 miliar US Dollar. Di industri hilir, produksi biji plastik dalam negeri bergantung pada trio produsen, yaitu PT. Chandra Asri, PT. Polytama Propindo, dan Pertamina, tetapi dalam operasionalnya mereka juga kesulitan masalah bahan baku pembuatan resin (biji) plastiknya, yaitu nafta dan kondensat. Dalam masalah ini sebenarnya Indonesia memiliki bahan baku nafta dan kondensat tersebut dari sumber daya alamnya, akan tetapi orientasi nafta dan kondensat didalam negeri masih cenderung di ekspor. Akibatnya kebutuhan bahan baku industri petrokimia dalam negeri tidak terpenuhi sehingga bahan baku tersebut harus impor, jumlah impor tersebut mencapai 8 miliar

US Dollar per tahun. Dalam sektor hilir tersebut seharusnya pemerintah memberikan solusi terhadap masalah bahan baku ini, supaya Industri Petrokimia nasional bisa lebih mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan plastik dalam negeri. Seharusnya pemerintah menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditi petrokimia agar lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kimia dalam negeri.

Ketertinggalan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor dan efisiensi yang rendah menyebabkan terjadinya defisit pasokan terhadap kebutuhan domestik yang selalu meningkat setiap tahun.²⁶

Impor akan produksi Petrokimia tetap cukup tinggi. Harga bahan baku yang tinggi dan harus diimpor dari luar, Dikarenakan tidak mampu memproduksinya didalam negeri.

2. DAYA SAING ANTAR NEGARA ANGGOTA ASEAN

Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Thailand mengalami perkembangan pertumbuhan industri hulu yang sangat pesat dengan kapasitas dan teknologi produksi yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, sehingga Industri Petrokimia mereka memiliki daya saing yang lebih baik bila dibandingkan Indonesia. Cost of money lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Sejak 10 tahun terakhir masalah yang dihadapi industri hulu *polyethylene* (PE) di Indonesia masih seputar terbatasnya bahan baku dasar yaitu nafta. Nafta digunakan untuk memproduksi produk hulu petrokimia yakni *ethylene* yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku utama dalam industri PE. Masalah ini juga dibahas dalam laporan *Joint Forum on Investment Competitiveness/SME WG Petrochemical Indonesia-Jepang* pada

²⁶ Iman Sudirman dan Horas Djulius, *Trikonomika*: Volume 9, No. 2, Desember 2010, Hal. 94

Maret 2007. Kondisi industri hulu petrokimia di Indonesia tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Mitsubishi Chemical Jepang pada 2006 memosisikan Indonesia diperingkat 34 dalam industri petrokimia dunia.

Di Indonesia, konsumsi bahan baku plastik masih relatif rendah yaitu baru mencapai sekitar 10 kg per kapita per tahun. Sementara dinegara ASEAN lainnya, seperti Singapura (80 kg), Malaysia (60 kg) dan Thailand (31 kg). Sedangkan dinegara maju, konsumsi plastik per kapita sudah mencapai diatas 100 kg. Dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa (ke empat setelah Cina, India dan Amerika Serikat), prospek industri plastik masih terbuka luas.²⁷

Simpulan

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh ASEAN-India Free Trade Agreement terhadap industri petrokimia Indonesia pada sektor perdagangan dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. ASEAN ataupun negara Indonesia khususnya menyadari adanya integrasi ekonomi yang tidak bisa dihindari. ASEAN berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya melalui kebijakan perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kerjasama regional dalam bentuk organisasi regional masih menjadi pilihan, hal ini dikarenakan ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk menghadapi perkembangan hubungan internasional yang kompleks dan adanya anggapan bahwa regionalisme dapat meningkatkan perekonomian.
2. Industri petrokimia dan turunannya merupakan industri prioritas di Indonesia. Industri Petrokimia Olefin menengah (*intermediate*) sedang pada tahap penguatan melalui peningkatan kapasitas (ekspansi) agar dapat memenuhi permintaan yang

semakin meningkat dan juga dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Secara umum, daya saing produk-produk Indonesia masuk dalam kategori rendah di ASEAN. Penurunan CEPT menjadi 0% pada tahun 2010 semakin menurunkan daya saing produk Indonesia dan pasar Indonesia semakin dipenuhi oleh produk-produk impor.

3. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi di dunia. Migas merupakan bahan baku utama dalam industri Petrokimia. Namun dengan diberlakukannya AFTA justru industri petrokimia Indonesia semakin terpuruk karena barang-barang dari India begitu mudahnya masuk di Indonesia sementara produksi dalam negeri masih berjalan lambat sebab industri petrokimia di Indonesia rata-rata belum terintegrasi dengan kilang minyak atau penyediaan bahan baku. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak seimbangny tingkat konsumsi dan produksi di Indonesia sehingga mengharuskan untuk impor bahan baku dan barang jadi.

Saran

Untuk meningkatkan daya saing juga perlu dibangun sebuah refinery yang khusus menjadi *feeder* bagi Industri Petrokima di Indonesia. Dengan demikian terdapat suatu integrasi industri petrokimia dari hulu ke hilir.

Beberapa produk petrokimia olefin dan turunannya sudah mengalami kelebihan pasokan akibat adanya penetrasi impor, namun pemerintah masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi para pelaku usaha dibidang ini. Diperlukan berbagai masukkan untuk perbaikan teknologi pada industri petrokimia, terutama pada industri plastik di Indonesia secara berkesinambungan untuk menghadapi pasar perdagangan bebas.

Referensi

Jurnal

Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN-
Direktorat Jenderal Kerjasama
ASEAN-Kementriaan Luar Negeri. 2010.
*Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN
Dengan Mitra Wicara*. Jakarta:

²⁷ Iman Sudirman dan Horas Djulius, *Trikonomika*:
Volume 9, No. 2, Desember 2010, Hal. 88-89

- Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN-Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN-Kementriaan Luar Negeri.
- Iman Sudirman dan Horas Djulius, *Trikonomika: Volume 9, No. 2*, Desember 2010.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2014. *Profil Industri Petrokimia Hulu*. Jakarta: PT. Mitra Media Nusantara.
- Radian Kusuma. "ASEAN Sepakati Perjanjian CEPT dengan Jepang dan India". 2003. Nusa Dua Bali : *Sinar Harapan*.
- Rina Oktaviani. "Dampak free trade arrangements (FTA) terhadap ekonomi makro, sektoral, regional, dan distribusi pendapatan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol 15, No 3 (2010).
- Sarah Anabarja. "Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community". *Jurnal global dan strategis*, Vol. 3, No. 1. Maret 2013.
- Buku**
- Amalia Adininggar Widyasanti. 2010. *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Bermand Hutagalung. 2012. *Memahami Kerjasama Ekonomi Perdagangan ASEAN - AFTA Dengan Mitra Dagang Lainnya*. Jakarta: Lembaga Studi Fenomena Globalisasi
- Dino Patti Djalal. 2001 "Prospek Hubungan RI-India", Jakarta: *Media Indonesia*.
- Gilpin, Robert. 2001. "The Nature of Political Economy". Dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton the University Press.
- Mohtar Mas' oed. 1990, *Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi)*, Jakarta: LP3ES.
- Mohtar Mas' oed. 1989. *Studi Hubungan Internasional (Tingkat analisa dan teorisasi)* Jakarta: PT Pustaka LP3S.
- Plano, Jack.C dan Olton, Roy. 1999. *Kamus Internasional* (Terjemahan Wawan Juanda), Bandung: Putra A Bardin.
- Rahul, Sen. 2004. *Free Trade Agreements in Southeast Asia*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. hal. 80. Gde Pradnyana. 2014. *Nasionalisme migas*. Banten. Nayottama press holdings.
- T. May Rudi. 1998. *Administrasi dan organisasi internasional*. Bandung: PT Eresco.
- T. May Rudi. 1993. *Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Bina Budaya.
- Artikel**
- ASEAN-India Segera Tuntaskan Materi Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas.
<http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/2112-asean-india-segera-tuntaskan-materi-perjanjian-kerjasama-perdagangan-bebas-.pdf>, diakses tanggal 10 september 2014 pukul 20.00 WIB
- ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The Second ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation 3 September 2003, Kamboja", melalui: <http://www.aseansec.org/15081.htm> , diakses pada tanggal 20 maret 2015, Pukul 22.00 WIB
- ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Fifth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India 24 August 2006 Kuala Lumpur," melalui: <http://www.aseansec.org/18717.htm>, diakses pada 13 april 2015 pukul 21.39 WIB
- ASEAN Sekretariat, "Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations," *Op. Cit. Department of Commerce Government of India, "India's Current Engagements in RTAs,"* melalui:http://commerce.nic.in/trade/international_ta_current_details.asp, diakses 16 April 2015, pukul 11.47 WIB

- ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Fourth AEM-India Consultations 30 September 2005, Vientiane Laos," dalam <http://www.aseansec.org/17799.htm>, (diakses pada 17 April 2015 pukul 22.00 WIB).
- ASEAN Sekretariat, "Joint Media Statement of the Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce and Industry of India, Singapore", <http://www.aseansec.org/21895.htm>, diakses pada tanggal 21 april 2015, pukul 17.50 WIB
- ASEAN Sekretariat, "Annex 1, Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India," melalui: <http://www.aseansec.org/22563.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2015, Pukul 13.00 WIB
- ASEAN Sekretariat, "Joint Press Statement, The First ASEAN Economic Ministers and The Minister of India Consultation 15 September 2002 Brunei Darussalam," melalui <http://www.aseansec.org/12315.htm>., diakses pada tanggal 19 maret 2015, Pukul 23.00 WIB
- ASEAN-India, http://www.kemendag.go.id/kerjasama_asean_-_india/, di akses pada 25 april 2015 pukul 14.18 WIB Bernama, "Asean-India FTA Implementation To Be Amended To Jan 1, 2007," melalui: http://www.bernama.com/bernama/v3/news_lite.php?id=157402, diakses pada tanggal 20 april 2015, pukul 18.09 WIB
- Direktorat Kerjasama Regional- Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. Februari 2010. *ASEAN – India Free Trade Area*. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20%20India%20FTA.pdf>, diakses tanggal 10 september 2014 pukul 21.00 WIB
- "Konsep dan Definisi Perdagangan Luar Negeri", dalam <http://www.bps.jakarta.go.id/p3-stat/P3A-perdag/P3AI-def.htm>, diakses 15 september 2014.pada pukul 10.00 WIB.
- KBRI India, *Laporan Tahunan 2001 Jilid 1*, (India: KBRI India, 2001), hlm. 17.
- MakalahBisnisInternasional.wahyutatag89.blogspot.com/2013/06/makalah-bisnis-internasional-keunggulan.html?m=1, diakses pada 14 september 2014 pada pukul 12.30 WIB
- Perdagangan Bebas Asean India*, <http://bataviase.co.id/node/220431>, diakses tanggal 10 september 2014 pukul 20.10 WIB
- THE ASEAN CHARTER, 2007.<http://www.kompas.com>. Edisi Selasa 11 Agustus 2009, Djauhari Oratmangun Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI. Diakses pada Sabtu, 21 November 2014.
- Vibhanshu Shekhar, "India's First Multilateral FTA: Lesson Learnt", <http://www.ipcs.org/article/south-asia/indias-first-multilateral-fta-lessons-learnt-2679.html>, diakses pada tanggal 16 april 2015, pukul 20.56 WIB
- Website**
- http://agro.kemenperin.go.id/e-klaster/file/roadmap/KIPBANTEN_1.pdf diakses pada 9 agustus 2015 pukul 21.09 WIB
- <http://staff.ui.ac.id/internal/132127784/material/INDUSTRIPETROKIMIA> diakses pada tanggal 9 agustus 2015 pada pukul 20.49 WIB.
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5230/Pembangunan-Industri-Harus-Terintegrasi>, diakses pada tanggal 6 agustus 2015 pukul 19.17 WIB.
- <http://industri.kontan.co.id/news/atasi-bahan-baku-industri-petrokimia-harus-terintegrasi-dengan-kilang-minyak>, diakses pada tanggal 6 agustus 2015 pukul 19.21 WIB.
- <http://www.uny.ac.id/berita/kesiapan-sdm-indonesia-menghadapi-afta-2015.html>. diakses pada tanggal 10 september 2014 pukul 20.30 WIB

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/in.html#Econ>, diakses pada tanggal 10 september 2014 pukul 21.30 WIB

<http://www.dprin.go.id/ind/statistik/einc/htm>, diakses 15 September 2014. Pada pukul 10.46 WIB.

<http://regionalinvestment.com/newsipid/id/userfiles/ppi/PERENCANAAN%20PENGEMBANGAN%20INVESTASI%20INDUSTRI%20PETROKIMIA%20TERINTEGRASI%202011.pdf> diakses tanggal 20 oktober 2014 pukul 08.00 WIB

<http://www.yiela.com/view/1381407/bisnis-petrokimia-di-asean-siapa-unggul>- diakses tanggal 20 oktober 2014 pukul 08.16 WIB

http://www.ficci.com/sector/88/Project_docs/sector-profile-FICCI-petrochemical.pdf diakses pada tanggal 20 oktober 2014 pukul 09.19 WIB

<http://www.equitymaster.com/research-it/sector-info/petrochem/Petrochemicals-Sector-Analysis-Report.asp> ,diakses pada tanggal 20 oktober 2014 pukul 09.21 WIB.